

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program pengembangan iklim penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam. Berdasarkan temuan yang peneliti temukan dan analisis yang telah peneliti lakukan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada DPMPTSP Kabupaten Agam telah dilaksanakan secara administratif, tetapi pelaksanaannya belum optimal secara substantif. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan standar operasional dalam dokumen perencanaan, keterbatasan sumber daya manusia dan nonmanusia, belum meratanya komunikasi kepada kelompok sasaran, belum efektifnya instrumen insentif, serta kondisi sosial dan lingkungan investasi daerah. Hal ini dapat dilihat dari variabel yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Van Horn yang mempengaruhi implementasi program seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, disposisi, serta kondisi sosial, ekonomi dan politik. Dilihat dari beberapa variabel berikut:

Secara regulatif, standar dan tujuan program telah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2018 serta Rencana Strategis DPMPTSP, namun pengukuran keberhasilannya secara operasional belum optimal

akibat ketidakkonsistenan penetapan indikator dan target tahunan. Selain itu, pelaksanaan prinsip keadilan melalui pemberian insentif fiskal masih belum berjalan efektif karena informasinya belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata dan nilai insentif yang ditawarkan dinilai kurang sebanding dengan beban retribusi pelaku usaha.

Ketersediaan sumber daya manusia pada kelompok jabatan fungsional penanaman modal secara kuantitas masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan beban kerja dan kebutuhan riil organisasi, meskipun upaya peningkatan kompetensi terus dilakukan melalui pelatihan. Di sisi lain, sumber daya non-manusia berupa alokasi anggaran APBD belum dimanfaatkan secara optimal serta keterbatasan sarana operasional dan perangkat kerja yang rusak menjadi hambatan utama dalam mendukung pemetaan potensi investasi dan mobilitas lapangan.

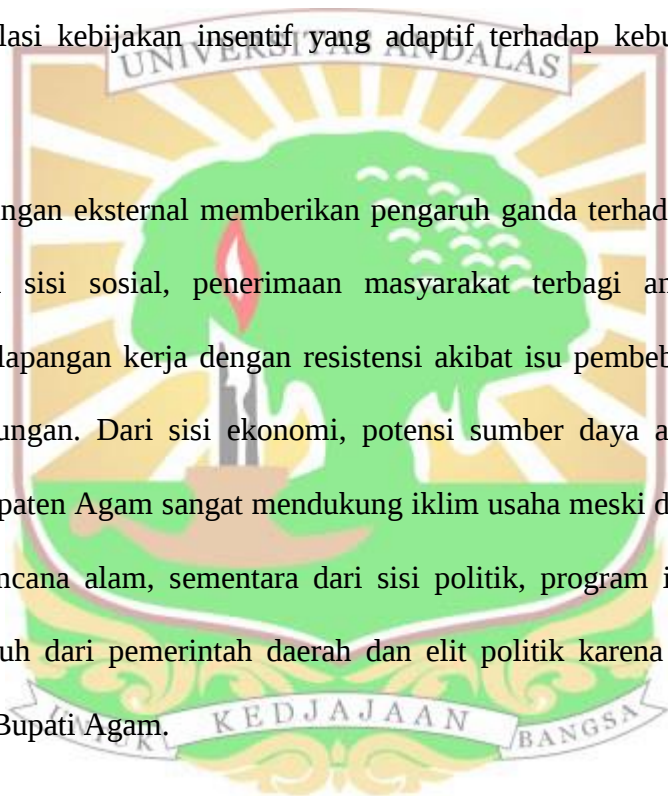
Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan rentang kendali struktur birokrasi yang sederhana, fleksibel, dan tidak berbelit-belit akibat transformasi struktur dari kepala seksi menjadi jabatan fungsional. Kondisi ini didukung oleh norma budaya kerja yang disiplin dan akuntabel sesuai standar pelayanan publik, serta pola hubungan kerja internal yang terjalin dengan baik antara pimpinan dan staf.

Mekanisme komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan DPMPSTSP maupun koordinasi lintas instansi telah berjalan dengan lancar dan rutin. Namun, komunikasi eksternal kepada kelompok sasaran masih lemah dan belum merata,

sehingga mayoritas pelaku usaha khususnya skala UMKM belum mengetahui keberadaan fasilitas insentif penanaman modal.

Para pelaksana kebijakan memiliki pemahaman kognitif yang mendalam terhadap aturan program, berkomitmen tinggi, serta memberikan respon dan kecenderungan positif untuk mencapai target peningkatan investasi daerah. Meskipun demikian, besarnya komitmen pelaksana tersebut belum diimbangi dengan formulasi kebijakan insentif yang adaptif terhadap kebutuhan riil para investor.

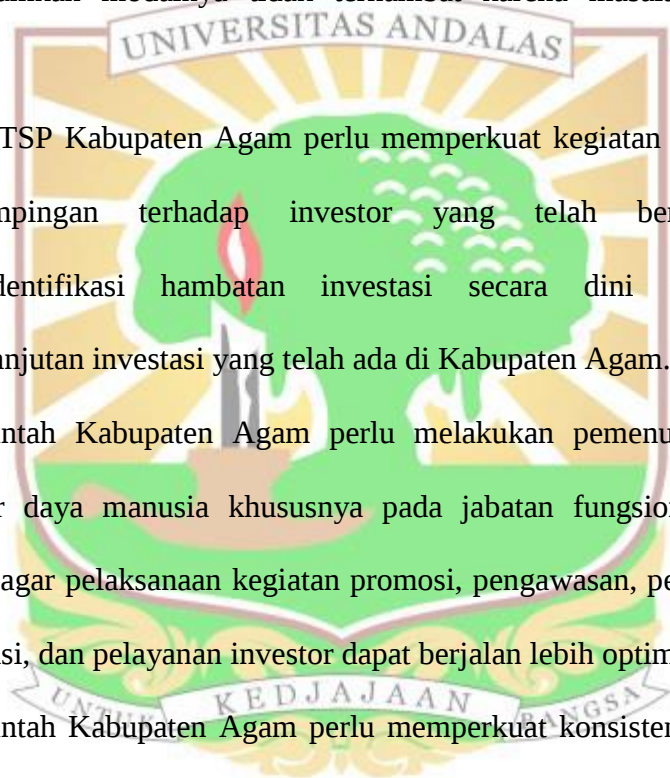
Lingkungan eksternal memberikan pengaruh ganda terhadap keberhasilan program; dari sisi sosial, penerimaan masyarakat terbagi antara dukungan pembentukan lapangan kerja dengan resistensi akibat isu pembebasan lahan dan dampak lingkungan. Dari sisi ekonomi, potensi sumber daya alam dan lokasi strategis Kabupaten Agam sangat mendukung iklim usaha meski dihadapkan pada kerawanan bencana alam, sementara dari sisi politik, program ini memperoleh dukungan penuh dari pemerintah daerah dan elit politik karena selaras dengan Misi RPJMD Bupati Agam.



6.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi program pengembangan iklim penanaman modal pada DPMPSTSP Kabupaten Agam yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat penalti berikan saran-saran yang diharapkan mampu membangun dan memperbaiki implementasi tentang program ini:

1. DPMPTSP Kabupaten Agam dapat melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih masif lagi dengan para penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Agam terkait pemberian insentif agar para penanam modal tertarik untuk tetap berinvestasi di Kabupaten Agam.
2. DPMPTSP Kabupaten Agam dapat melakukan mediasi dengan masyarakat mengenai pembebasan lahan agar para investor yang ingin menanamkan modalnya tidak terhambat karena masalah pembebasan lahan.
3. DPMPTSP Kabupaten Agam perlu memperkuat kegiatan monitoring dan pendampingan terhadap investor yang telah beroperasi guna mengidentifikasi hambatan investasi secara dini serta menjaga keberlanjutan investasi yang telah ada di Kabupaten Agam.
4. Pemerintah Kabupaten Agam perlu melakukan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia khususnya pada jabatan fungsional penanaman modal agar pelaksanaan kegiatan promosi, pengawasan, pemetaan potensi investasi, dan pelayanan investor dapat berjalan lebih optimal.
5. Pemerintah Kabupaten Agam perlu memperkuat konsistensi perencanaan program penanaman modal antara RPJMD, Renstra, dan Renja, terutama dalam penetapan indikator, target, keluaran, dan metode pengukuran. Penyusunan target investasi perlu didasarkan pada kondisi riil, potensi daerah, serta kapasitas pemerintah daerah agar target yang ditetapkan dapat menjadi instrumen perencanaan dan evaluasi yang realistis serta terukur.



6. Pemerintah Kabupaten Agam perlu meninjau kembali mekanisme penetapan target investasi daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah, kondisi perekonomian, tren realisasi investasi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih realistis, terukur, dan mencerminkan kondisi investasi di Kabupaten Agam.

